

TANGGUNG JAWAB MORAL KAUM INTELEKTUAL INDONESIA MENERUSKAN CITA-CITA PARA PENDIRI DAN PAHLAWAN BANGSA

Oleh : Meutia Hatta Swasono*

Abstract

Intellectuals have a responsibility to continue the struggle of the pioneers of independence and Indonesia national hero to make Indonesia a great country and its people have high dignity. Therefore, Indonesian intellectuals must be sensitive and responsive to the condition of socio-cultural, economic and political as well as the ecology of our country, able to see anomalies that occur and find a solution immediately. As citizen, Indonesian intellectuals should not only work for a living, but also work with the principle of increasing social welfare.

Indonesian intellectuals must understand the history of their nation. Without understanding the history, intellectuals Indonesia, especially students, will not know which direction they have to build Indonesia in the future, what moral and physical responsibility as citizens and sons of the nation, and how to build a bright future of Indonesia with high dignity.

Keywords: intellectuals, history, social welfare

Abstrak

Kaum intelektual mempunyai tanggungjawab melanjutkan perjuangan para perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia untuk membuat Indonesia menjadi negara besar dan rakyatnya berharkat-martabat tinggi. Untuk itu, kaum intelektual Indonesia harus peka dan tanggap terhadap kondisi sosial-budaya, ekonomi dan politik serta ekologi negara kita, mampu melihat keganjilan yang terjadi dan segera mencari solusi. Sebagai warganegara, kaum intelektual Indonesia seharusnya tidak saja bekerja untuk mencari nafkah, tetapi sekaligus bekerja dengan prinsip meningkatkan kesejahteraan sosial.

Kaum intelektual Indonesia harus memahami sejarahnya. Tanpa memahami sejarah, kaum intelektual Indonesia, khususnya mahasiswa, tidak akan tahu ke arah mana membangun Indonesia, apa tanggungjawab moral dan fisiknya sebagai warganegara dan anak bangsa, dan bagaimana caranya membangun masa depan Indonesia yang cerah dan penuh martabat tinggi.

Kata Kunci: kaum intelektual, sejarah, kesejahteraan sosial

1. Pendahuluan

Hari Pahlawan jatuh pada tanggal 10 November, memperingati sejarah tentang perang kemerdekaan yang hebat yang dilakukan oleh rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu, yang menyebabkan tewasnya Jenderal Mallaby. Semoga generasi muda masa kini masih ingat peristiwa yang terdapat di buku Sejarah Nasional, khususnya saat bangsa Indonesia telah mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda yang ingin menjajah Indonesia kembali.

Penting untuk diingat oleh generasi muda Indonesia masa kini bahwa kemenangan *arek-arek* Surabaya itu telah terjadi karena adanya rasa kebersamaan yang mendorong rasa persatuan

yang kokoh, dengan adanya perasaan kebangsaan yang amat besar pada penduduk Surabaya yang berasal dari berbagai sukubangsa, umat agama, tua-muda, kaya-miskin, yang sama-sama mempunyai komitmen mempertahankan kotanya. Lebih dari 16.000 syuhada telah gugur, namun perjuangan gigih mereka telah membuktikan bahwa peluru dan senjata hebat di kala itu tak mampu mendobrak semangat perjuangan mereka untuk meraih kemenangan.

2. Pahlawan Bangsa, Siapa Mereka?

Pahlawan bangsa adalah anak bangsa Indonesia yang dengan jiwa besar telah rela berkorban dan pantang mundur dalam membela

tanah air dan rakyatnya dari ketertindasan, keterbelengguan dan penderitaan oleh bangsa lain atau kekuatan asing. Pahlawan berjuang mencapai apa yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, walaupun jiwanya terancam.

Di kala tanah air masih terjajah oleh bangsa lain, pahlawan berjuang untuk memerdekakan bangsa, tanpa memikirkan kepentingannya sendiri karena berjuang tanpa pamrih. Di kala kemerdekaan terancam, pahlawan berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negaranya. Di kala tanah air dan bangsa telah merdeka dan aman dari rongrongan pihak penjajah, pahlawan berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan membangun negara, dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Pahlawan secara konsisten tetap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya, apalagi yang dapat merugikan rakyat dan negaranya. Bagi pahlawan, prinsip rela berkorban dan pantang mundur dalam memperjuangkan kemajuan dan keselamatan bangsa dan negaranya, tetaplah melekat pada dirinya hingga akhir hayatnya.

Pada umumnya orang mengira bahwa pahlawan berjuang dengan senjata. Anggapan ini keliru, karena tidak selalu pahlawan berjuang dengan senjata, melainkan dengan pikirannya yang tajam dan terkadang menembus waktu, melontarkan gagasan yang manfaatnya sering baru dirasakan oleh masyarakat sesudah dirinya wafat. Untuk itu, di sini hanya akan diberi dua contoh tentang perjuangan pahlawan bangsa: Ibu R.A. Kartini dan Bung Hatta.

Ibu R.A. Kartini tidak pernah berjuang dengan senjata, karena beliau adalah pemikir yang melahirkan gagasan-gagasan cemerlang yang kemudian disambut oleh tokoh-tokoh lainnya, seperti R. Dewi Sartika, dan lain-lain, untuk memberdayakan perempuan Indonesia, dengan mendirikan sekolah-sekolah bagi kaum perempuan, maupun keterampilan lain. Ibu Kartini menyuarakan agar perempuan Indonesia mendapat kesempatan belajar dan mengembangkan kreativitasnya, agar lebih mampu mendidik anak-anaknya dan meningkatkan kualitas kesejahteraan rumahtangganya serta terhindar dari poligami. Ibu R.A. Kartini kita homati dan banggakan sebagai pahlawan nasional karena dari gagasan beliau maka kita kini memiliki kementerian yang memberdayakan perempuan dan negara mengangkat perempuan dalam kedudukan setara dengan laki-laki dalam hukum dan pemerintahan.

Untuk itu, perempuan dan laki-laki sama-sama berhak dan wajib mengisi pembangunan nasional.

Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta) juga tidak berjuang dengan senjata, karena beliau adalah pemikir dan penyemangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, sekaligus disainer dari arah Indonesia Merdeka, yang bertumpu pada kebangsaan dan kerakyatan, dan peletak dasar strategi kemerdekaan. Pada usia 24 tahun, di Kongres Internasional di Bierville, Perancis, di bulan Agustus 1926, Bung Hatta sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia mewakili mahasiswa Indonesia membuat langkah awal memperkenalkan tanah air Indonesia di luar negeri. Setelah Bung Hatta berpidato di Kongres dan berdiplomasi dengan wakil-wakil berbagai delegasi mahasiswa dari negara-negara terjajah lainnya, sampai hari penutupan Kongres, mereka tidak lagi menyebut Indonesia dengan sebutan “Hindia-Belanda”, melainkan “Indonesia”.

Perjuangan lain dari Bung Hatta adalah memberi usulan penting dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta mendisain beberapa isu penting dan strategis dalam rancangan UUD 1945 yang asli, yang kemudian menjadi Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 30. Bung Hatta adalah juga konseptor Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang asli, sehingga sesuai disain Bung Hatta, sistem perekonomian nasional bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Karena itulah maka selain mendapat gelar Pahlawan Proklamator dari Pemerintah RI di era Presiden Suharto, Bung Hatta juga diberi gelar Bapak Koperasi oleh Dekopin (1947), Bapak Kedaulatan Rakyat oleh Mensesneg Moerdiono (2002), dan disebut Bapak Hak Asasi Manusia oleh Kementerian Hukum dan HAM (2008).

3. Tanggungjawab Kaum Intelektual Indonesia Kini dan Esok

Kaum intelektual mempunyai tanggungjawab untuk melanjutkan perjuangan para perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia untuk membuat Indonesia menjadi negara besar dan rakyatnya berharkat-martabat tinggi. Untuk itu, kaum intelektual Indonesia harus peka dan tanggap terhadap kondisi sosial-budaya, ekonomi dan politik serta ekologi negara kita, mampu melihat keganjilan yang terjadi dan segera mencari solusi. Singkatnya, kaum intelektual Indonesia harus tetap memegang teguh prinsip nasionalisme dalam perjuangan, pekerjaan dan karir mereka. Sebagai warganegara,

seharusnya kaum intelektual Indonesia tidak saja bekerja untuk mencari nafkah, tetapi sekaligus bekerja dengan prinsip meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pertama, kaum intelektual Indonesia harus memahami penduduk Indonesia yang berjumlah 237 juta jiwa dan bersifat pluralistik dan multikultural. Apa yang akan terjadi kalau penduduk sebanyak itu dan berbeda sukubangsa dan kebudayaannya tidak mempunyai perasaan kebersamaan dan bersatu sebagai bangsa, lebih-lebih ketika saat ini pengaruh luar yang dibawa proses globalisasi dan kemajuan iptek dan informatika telah masuk begitu pesat?

Kedua, penduduk Indonesia setara jumlahnya dari segi gender (perimbangan antara laki-laki dan perempuan). Apa jadinya kalau perempuan tidak diberdayakan dan indeks pembangunan manusianya rendah? Pasti akan menjadi beban berat bagi laki-laki untuk menanggung kehidupan kaum perempuan yang kualitas kesehatannya rendah, tidak cukup berpendidikan dan tidak mampu ikut mencari nafkah sehingga hidup dalam kondisi miskin.

Ketiga, Indonesia adalah negara maritim, 2/3 wilayahnya berupa laut. Apa yang terjadi kalau 80.000 km pesisir berikut penduduknya tidak diberdayakan sehingga menjadi beban pembangunan nasional? Bagaimana jika untuk menggali potensi lautan kita yang begitu luas dan bervariasi ekosistemnya kita harus tergantung pada pengetahuan, teknologi, strategi pemberdayaan ekonomi dan kegiatan ekonomi bangsa lain yang mencari untung di tanah air kita? Seharusnya kitalah sumber pengetahuan kelautan bagi bangsa lain dan Berjaya dalam bisnis kelautan di negara kita sendiri.

Keempat, sumberdaya alam Indonesia dengan kekayaan hayatinya dan sumberdaya manusia Indonesia dengan kebudayaannya yang kaya akan kearifan lokal suku-sukubangsanya merupakan modal sosial-kultural dan alam. Apakah yang akan terjadi bila potensi-potensi ini tidak diperhatikan dan didayagunakan sehingga menghilang karena terabaikan?

Kelima, kaum intelegensia Indonesia wajib memahami sejarah nasional, agar tertanam nasionalisme pada diri mereka. Nasionalisme inilah yang menjadi dasar bagi mereka untuk membangun Indonesia, dan membedakan diri mereka dari bangsa lain dalam melihat Indonesia. Bangsa lain bekerja di Indonesia untuk kepentingan dirinya dan negaranya, dalam kerjasama berdasarkan persahabatan (berbentuk

kerjasama bilateral), atau mencari keuntungan yang tentunya ditujukan terutama bagi kepentingan diri mereka dan negaranya sendiri. Bangsa Indonesia, termasuk kaum intelektual Indonesia, bekerja untuk hidup namun tidak terlepas dari kewajiban moral dan spiritual untuk membangun bangsa Indonesia. Artinya kita sendirilah yang harus bekerja membangun negara dan bangsa, bukan bangsa lain. Tidak berarti bahwa kita harus menolak kerjasama dengan asing. Kita tidak boleh mengabaikan tanggungjawab global, namun kita harus tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Kaum intelektual atau kaum intelegensia Indonesia harus memahami proses pembentukan negara RI secara cermat, bahwa NKRI terbentuk melalui proses yang panjang yang saling terkait dalam hubungan sebab-akibat dan saling dukung serta saling melanjutkan, dimulai dari: (1) era Kebangkitan Nasional yang dicetuskan Budi Utomo yang mendorong terbentuknya gerakan-gerakan pemuda di tanah air (*Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Celebes*, dan lain-lain); (2) Deklarasi Manifesto Politik dari Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, yang menanamkan kedaulatan rakyat, kemandirian dan kesatuan; (3) Deklarasi Sumpah Pemuda yang mencanangkan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa; (4) tumbuhnya gerakan-gerakan kebangsaan untuk mencapai Indonesia Merdeka, yang diwarnai dengan penangkapan sejumlah tokoh perintis kemerdekaan Pemerintah Hindia-Belanda untuk diinternir ke sejumlah tempat pembuangan di tanah air; (5) perjuangan penuh perhitungan seksama di masa pendudukan Jepang, menghadapi penguasa Jepang yang kejam; dan (5) persiapan kemerdekaan Indonesia dan tercapainya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno dan Hatta di Jakarta.

Tanpa memahami sejarah, kaum intelektual Indonesia, khususnya mahasiswa yang muda-muda, tidak akan tahu, ke arah mana membangun Indonesia, apa tanggungjawab moral dan fisiknya sebagai warganegara dan anak bangsa, dan bagaimana caranya untuk membangun masa depan Indonesia yang cerah dan penuh martabat tinggi kelak di kemudian hari.

Pemuda harus paham mengenai nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Menurut Sri-Edi Swasono, nasionalisme adalah rasa cinta kepada tanah air, nusa dan bangsa. Nasionalisme adalah patriotisme. Nasionalisme adalah doktrin ideologis untuk mengutamakan kepentingan

nasional. Nasionalisme adalah suatu gerakan untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, *independency* dan kemandirian. Nasionalisme adalah kesadaran kebangsaan, harga-diri, dan identitas diri sebagai suatu bangsa” (Swasono, 2011: 4).

Bagaimana kita menunjukkan nasionalisme dalam era reformasi ini?

1. Menanamkan kebanggaan pada diri kita dan lingkungan kita sesama orang Indonesia melalui kebiasaan memakai produk-produk industri nasional, seperti tekstil, asesoris, teknologi dan peralatan sehari-hari buatan Indonesia.
2. Mengutamakan konsumsi makanan dan minuman serta obat-obatan Indonesia.
3. Menghasilkan temuan-temuan inovatif berupa teknologi tepat guna, dan lain-lain.
4. Berperilaku modern dan tertib (belajar keras, memanfaatkan waktu, berbudaya bersih, sebagai bagian dari upaya meningkatkan karakter dan jati diri bangsa Indonesia).
5. Menghasilkan temuan-temuan yang berasal dari potensi-potensi sosial-kultural masyarakat untuk didayagunakan lebih lanjut bagi kepentingan rakyat.
6. Menanamkan pola pikir bahwa ilmu adalah untuk diamalkan bagi masyarakat, serta mencari solusi terhadap permasalahan bangsa dan negara.
7. Memahami bahwa pembangunan nasional harus bersifat humanistik, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan membuat rakyat menjadi tuan di negerinya sendiri.

Hanya dengan melakukan hal-hal di atas maka kaum intelektual Indonesia masa kini mampu untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri negara untuk mendisain dan mencapai masa depan Indonesia yang cerah serta mampu untuk ikut mengukir peradaban dunia sebagai pemimpin global sejati.

***Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono**

Guru Besar FISIP Universitas Indonesia dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

“Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.”

Mohammad Hatta